

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA TOMOHON**

*EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ANALYSIS FOR THE BUDGETING IMPLEMENTATION IN
THE RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT OF TOMOHON CITY*

Oleh:

Harry P. Paat¹
Grace B. Nangoi²
Rudy J. Pusung³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

paatharry765@gmail.com

²gracebn@yahoo.com

³rudypusung@yahoo.com

Abstrak : Penyelenggaraan dalam Pemerintah Daerah terlebih khusus setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memperhatikan pengelolaan sumber daya (dana) dengan baik, dalam hal ini penganggaran yang dilakukan dan direncanakan harus dipertimbangkan baik dan tepat, sehingga dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, untuk periode anggaran tahun 2015-2017. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini berupa perhitungan tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi dari anggaran belanja. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dari pelaksanaan anggaran belanja tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan persentase, dimana tahun 2015 yaitu 93,44% dalam kategori efektif, tahun 2016 yaitu 84,45% dengan kategori cukup efektif, dan tahun 2017 yaitu 85,68% dengan kategori cukup efektif, sehingga dapat dikatakan mengalami penurunan dari kriteria efektif menjadi cukup efektif. Diharapkan pihak instansi dapat melakukan perencanaan yang baik dan matang dalam pencapaian target anggaran sehingga dalam penyerapan anggaran dalam setiap program dan kegiatan yang tercantum pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat terealisasi semuanya dan memungkinkan untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas dari realisasi anggaran belanja.

Kata Kunci : *efektivitas, efisiensi, analisis anggaran belanja*

Abstract : *Implementation in the Local Government, especially for each Regional Device Organization (OPD) needs to pay attention to resource management (financial) properly, in this case the planning and the executing of budgeting should be contemplated thoroughly, so the effective and efficient accomplishment could be carried out as expected. The purpose of this research is to analyze the effectiveness and efficiency of budget execution on Agency for Regional Development of Tomohon, for the 2015-2017 period. The budget effectivity and efficiency level calculation was used as the analysis method for this research. The findings shows that the effectivity of 2015-2017's budgeting underwent increasing and decreasing percentage, where in 2015 it was 93,44% (effective); in 2016 it was 84,45 (fairly effective); and in 2017 it was 85,68% (fairly effective); so it can be said that the category suffered a declining from effective to be fairly effective. The institute is expected to make a well and careful planning in achieving the targets for budgeting so that in budget absorption in each program and activity that is listed for the budget implementation can be carried out and for the effectiveness of the budget realization can increase in the years following.*

Keywords: *effectivity, efficiency, analysis of budget*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan Negara. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan serta relasi Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Meninjau hal tersebut lewat Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017 dimana Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah maupun DPRD diberikan kewenangan untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam keterkaitannya sebagai pelaksana kewenangan daerah otonom.

Terkait dalam proses penyusunan APBD harus dilandaskan prinsip, dimana harus sesuai dan benar-benar berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mampu taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, bertanggung jawab dan memberikan manfaat pada masyarakat seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 31 tahun 2016. APBD menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mengukur seberapa besar pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya lewat penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga dalam perwujudan *Good Governance* dan akuntabilitas dalam lingkup Pemerintahan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap perencanaan suatu daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintah, karena sangat bergantung terhadap jumlah anggaran yang direalisasikan atau diberikan oleh Pemerintah, sehingga mampu memungkinkan pencapaian secara ekonomi, efektivitas dan efisiensi (*value for money*) dari penyelenggaraan pemerintahan, serta tujuan dari masing-masing organisasi atau instansi dapat terlaksanakan. Siregar (2017:21) berpendapat, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Setiap Daerah dituntut untuk mampu mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri, berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilaksanakan secara akuntabilitas dan transparansi sehingga membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kota Tomohon, menjadi unsur perencanaan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang juga mempunyai tugas membantu Kepala Daerah terkait yaitu Walikota dan dalam pengawasan internalnya oleh Inspektorat serta memiliki wilayah kerja seluruh Kota yang ada di Tomohon. Dalam melaksanakan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan, Bapelitbang sendiri mempunyai peran penting yaitu melakukan analisis terhadap perencanaan dan pembangunan Kota Tomohon yang akan bermuara pada anggaran dan belanja daerah sehingga pengelolaannya dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD dan dokumen perencanaan satu tahunan yaitu RKPD. Dari RKPD terkait disusunlah KUA-PPAS yang ada dibahas dengan DPRD selanjutnya menjadi RKA pada masing-masing Perangkat Daerah. Dari RKA tersebut disusunlah RAPBD oleh Pemerintah Daerah, setelah dibahas dengan DPRD dan evaluasi dari Provinsi ditetapkan menjadi APBD.

Terkait pembangunan yang ada di kota Tomohon sudah dirasakan oleh masyarakat lewat pembangunan infrastruktur untuk pelayanan kepada masyarakat antara lain jalan, rumah sakit, dan pasar tradisional yang dibuat pemerintah Kota Tomohon yang semuanya itu berawal dari perencanaan. Hal ini tentunya menjadi tolak

ukur dari Pemerintah Daerah Kota Tomohon terlebih khususnya berkaitan dengan bidang perencanaan dan pembangunan yaitu Bapelitbang sendiri. Seperti yang ditekankan oleh Walikota Tomohon Jimmy F. Eman untuk kedepannya dimana “Harapan kami nantinya agar apa yang kita hasilkan, putuskan dan sepakati benar-benar dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah agar pada saatnya kita akan menghasilkan APBD pada tahun kedepan yang semakin capable mengakumulasi berbagai kebutuhan pembangunan daerah dan kualitasnya semakin baik dari tahun ke tahun,” tutup Jimmy F. Eman dalam rapat Bapelitbang Tomohon mengenai Musrenbang RKPD tahun 2018. Sehingga dapat dikatakan Bapelitbang Daerah Kota Tomohon mempunyai peranan penting dalam hal tersebut, dalam setiap tugas untuk penjabaran program yang akan dilaksanakan Bapelitbang sendiri menyangkut efektivitas dan efisiensi.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2015-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Siregar (2017:3) berpendapat akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam Mardiasmo (2018:2) menyatakan akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta ... secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Definisi Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 2 menyatakan definisi anggaran yaitu: anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Definisi lain yang dikemukakan oleh M. Marsono pada bukunya “Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia” dalam Halim dan Iqbal (2012:138) memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan mengenai realisasi anggaran yaitu menyangkut pelaporan tentang penggunaan anggaran dalam periode anggaran apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati bersama. Siregar (2017:117) berpendapat, laporan realisasi anggaran adalah laporan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah (Siregar, 2017:32). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meninjau hal itu semua sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan klasifikasi belanja menurut organisasi pada masing-masing pemerintah daerah terbagi atas 2 bagian/kelompok, yaitu:

1. Belanja tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
2. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Efisiensi merupakan hubungan antara *output* berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas ... suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Efisiensi berarti pembelanjaan anggaran secara cermat (*spending well*) dalam (Mahmudi, 2018: 21).

Berikut ini adalah pengukuran efisiensi anggaran belanja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Efisiensi anggaran belanja, dikatakan efisien apabila memenuhi kriteria efisiensi dari keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tentang "Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan", ketentuan tingkat efisiensi dari anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja

Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan (*target*) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Hasil atau target yang diharapkan merupakan *outcome* sedangkan hasil yang dicapai merupakan *output*. Efektivitas membandingkan antara *outcome* dengan *output* ... suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dengan kata lain anggaran digunakan secara tepat (*spending wisely*) dalam (Mahmudi, 2018: 22).

Pengukuran efektivitas anggaran belanja diukur lewat perbandingan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja, yang dikemukakan oleh Mahsun (2009), yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Dimana dalam efektivitas anggaran belanja, dikatakan atau dinilai efektif jika masuk dalam kriteria tingkat efektivitas atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang "Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan" sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- e. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Penelitian Terdahulu

Trianto (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Palembang selama periode 2003- 2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien.

Pangkey (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu dalam periode anggaran belanja 2010-2014 untuk efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung keseluruhannya tidak efektif karena dari setiap program dan anggaran yang direncanakan, tapi tidak sesuai anggaran yang direncanakan dan ada juga program yang tidak terealisasi. Sementara untuk tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung dari periode 2010-2014 tidak efisien.

Rampengan (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat atau kriteria efektifitas anggaran belanja pada BAPPEDA Kota Manado tahun 2011–2015 yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2015 dan yang terendah terjadi pada tahun 2013. Tingkat atau kriteria efisiensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado Tahun 2011– 2015, secara keseluruhan sudah di olah secara baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif, dimana semua data, dokumen, dan hasil wawancara dikemukakan atau dijelaskan secara kualitatif melalui penggambaran dan kata-kata. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan hasil pengamatan/observasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Tomohon. Dalam mendapatkan data yang akurat tentang Anggaran Belanja terkait objek yang ingin diteliti, data diambil langsung oleh peneliti di Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan (Bapelitbang) Kota Tomohon yang berkedudukan di Jl. Wakas, Paslaten Dua, Kec. Tomohon Timur. Waktu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2019 sampai Juni 2019.

Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sebagai data kualitatif berupa gambaran umum mengenai Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kota Tomohon sedangkan untuk data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon.

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa data yang diambil langsung dari objek yang diteliti lewat hasil wawancara dengan narasumber terkait efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, sedangkan untuk data sekunder peneliti memperoleh data lewat catatan, dokumen, dan artikel terkait permasalahan pada objek yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi tahap penting dalam penyelesaian penelitian ini, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan pengumpulan data lewat:

1. Studi kepustakaan (*library research*), dimana data yang diambil bersifat kajian teori-teori lewat buku, artikel, dan *browsing* lewat internet yang kemudian dijadikan landasan teoritis dan pendukung terkait permasalahan yang akan diteliti.
2. Dokumentasi, dimana diperoleh lewat dokumen dan catatan-catatan yang ada, dimana data atau dokumen berupa Struktur organisasi Bapelitbang Daerah Kota Tomohon, Visi dan Misi, Fungsi dan Tugas, dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2017.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah melalui perhitungan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas dari anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kota Tomohon, yaitu:

1. Perhitungan Tingkat Efisiensi

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan *output* yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Untuk itu perhitungan tingkat efisiensi dari anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Tomohon dapat dihitung lewat perbandingan antara tingkat realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja langsung. Sehingga dapat dihitung dengan rumus seperti ini, Mahsun (2009):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan”, ditetapkan tingkat efisiensi dari anggaran belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Efisiensi

| Tingkat Efisiensi (%) | Kriteria |
|-----------------------|----------------|
| >100 | Tidak Efisien |
| 90-100 | Kurang Efisien |
| 80-90 | Cukup Efisien |
| 60-80 | Efisien |
| <60 | Sangat Efisien |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327, 1996

2. Perhitungan Tingkat Efektivitas

Tingkat pengukuran efektivitas menjadi salah satu tolak ukur juga terhadap pencapaian pemerintah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan terlaksanakan dengan baik atau tidak. Sehingga dapat dihitung menggunakan rumus, Mahsun (2009):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Maka untuk tingkat efektivitas atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang “Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan” disajikan dalam tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas

| Tingkat Efektivitas (%) | Kriteria |
|-------------------------|----------------|
| >100 | Sangat Efektif |
| 90-100 | Efektif |
| 80-90 | Cukup Efektif |
| 60-80 | Kurang Efektif |
| <60 | Tidak Efektif |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900-327, 1996

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan peraturan Walikota Tomohon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon sesuai amanat peraturan berkewajiban menyusun salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yaitu penyusunan Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan

salah satu dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tomohon untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Tomohon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil Penelitian

1. Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas Anggaran Belanja

Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015-2017

| Tahun | Target Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|----------------------|----------------|
| 2015 | 6.283.035.663 | 5.871.168.517 |
| 2016 | 9.516.428.362 | 8.036.657.421 |
| 2017 | 7.865.325.266 | 6.739.348.116 |

Sumber Data : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, 2015-2017

Melalui tabel realisasi anggaran belanja diatas dapat dilalukan perhitungan sebagai berikut:

- Pada tahun 2015, Target anggaran belanja berjumlah Rp. 6.283.035.663 dengan realisasinya sebesar Rp. 5.871.168.517, sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2015 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2015} = \frac{5.871.168.517}{6.283.035.663} \times 100\% = 93,44\%$$

- Pada tahun 2016, Target anggaran belanja berjumlah Rp. 9.516.428.362 dengan realisasinya sebesar Rp. 8.036.657.421, sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2016 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2016} = \frac{8.036.657.421}{9.516.428.362} \times 100\% = 84,45\%$$

- Pada tahun 2017, Target anggaran belanja berjumlah Rp. 7.865.325.266 dengan realisasinya sebesar Rp. 6.739.348.116, sehingga perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja Tahun 2017 sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2017} = \frac{6.739.348.116}{7.865.325.266} \times 100\% = 85,68\%$$

2. Hasil Perhitungan Analisis Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015-2017

| Tahun | Realisasi Belanja Langsung (Rp) | Realisasi Anggaran Belanja(Rp) |
|-------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2015 | 3.345.743.015 | 5.871.168.517 |
| 2016 | 4.963.712.499 | 8.036.657.421 |
| 2017 | 3.284.313.960 | 6.739.348.116 |

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon, 2015-2017

Melalui tabel diatas dapat dilakukan perhitungan efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- Pada Tahun 2015, Realisasi Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp. 3.345.743.015 dengan Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 5.871.168.517, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2015} = \frac{3.345.743.015}{5.871.168.517} \times 100\% = 56,98\%$$

- b. Pada Tahun 2016, Realisasi Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp. 4.963.712.499 dengan Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.036.657.421, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2016} = \frac{4.963.712.499}{8.036.657.421} \times 100\% = 61,76\%$$

- c. Pada Tahun 2017, Realisasi Anggaran Belanja Langsung sejumlah Rp. 3.223.650.960 dengan Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.739.348.116, maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Tahun 2017} = \frac{3.284.313.960}{6.739.348.116} \times 100\% = 48,73\%$$

Pembahasan

1. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Tabel 5. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015-2017

| Tahun | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Efektivitas (%) | Kriteria |
|-------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 2015 | 6.283.035.663 | 5.871.168.517 | 93,44 | Efektif |
| 2016 | 9.516.428.362 | 8.036.657.421 | 84,45 | Cukup Efektif |
| 2017 | 7.865.325.266 | 6.739.348.116 | 85,68 | Cukup Efektif |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Data Olahan, 2019

Dari tabel 5. dapat dilihat efektivitas anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon dari tahun 2015-2017 selalu berubah, perubahan terjadi mulai dari efektif kemudian turun menjadi cukup efektif. Pada tahun 2015 persentase efektivitas anggaran belanja yaitu 93,44% dapat dikriteriakan efektif, selanjutnya ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 84,45% dikriteriakan sebagai cukup efektif, dan ditahun 2017 sedikit mengalami kenaikan yaitu 85,68% namun masih dikategorikan cukup efektif.

2. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon

Tabel 6. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Tahun 2015-2017

| Tahun | Realisasi Belanja Langsung (Rp) | Realisasi Anggaran Belanja (Rp) | Efisiensi(%) | Kriteria |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 2015 | 3.345.743.015 | 5.871.168.517 | 56,98 | Sangat Efisien |
| 2016 | 4.963.712.499 | 8.036.657.421 | 61,76 | Efisien |
| 2017 | 3.223.650.960 | 6.739.348.116 | 47,83 | Sangat Efisien |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Data Olahan, 2019

Melalui tabel diatas dapat dilihat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon tahun 2015-2017 mengalami perubahan persentase tiap tahunnya. Pada tahun 2015 efisiensi dari anggaran belanja sebesar 56,98% ini dikategorikan sangat efisien, untuk tahun 2016 mengalami kenaikan persentase yaitu 61,76% sehingga dikategorikan efisien, namun dalam penilaian kriteria efisiensi ini dinilai mengalami penurunan. Kemudian untuk tahun 2017 mengalami kenaikan efisiensi yaitu 47,83% sehingga dikriteriakan sangat efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan serta pengelolaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon periode anggaran tahun 2015-2017 mengalami kenaikan dan penurunan persentase dalam tingkat efektivitas, dimana tahun 2015 yaitu 93,44% dalam kategori efektif, tahun 2016 yaitu 84,45% dengan kategori cukup efektif, dan tahun 2017 yaitu 85,68% dengan kategori cukup efektif. Kenaikan dan penurunan efektivitas anggaran belanja dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon tidak terealisasi semuanya. Namun dari keseluruhan periode anggaran belanja ini sudah dinilai baik, karena mampu menghindari persentase tingkat efektivitas yang kurang efektif yaitu 60-80% dan kurang dari 60% untuk kategori tidak efektif.
2. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon pada tahun 2015 persentasenya yaitu 56,98% dimana sangat efisien, tahun 2016 yaitu 61,76% dengan kriteria efisien, dan tahun 2017 yaitu 47,83% dikategorikan sangat efisien. Ini menunjukkan bahwa persentase tingkat efisiensi mengalami fluktuasi, namun dari kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi tidak menyentuh angka persentase 80- 90% untuk kriteria cukup efisien, juga angka persentase 90-100% untuk kriteria kurang efisien, dan dapat menghindari angka lebih dari 100% dimana dikategorikan tidak efisien. Sehingga dapat dikatakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon telah mengatur efisiensi dari anggaran belanjanya, agar dapat meminimalisir pemborosan dan memaksimalkan pengelolaan dalam penggunaan sumber daya (dana).

Saran

1. Menilai dari segi efektivitas realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon dari tahun 2015-2017, dimana tahun 2016 dan tahun 2017 masih mencakup kategori cukup efektif. Untuk kedepannya, diharapkan dapat melakukan perencanaan yang baik dan matang dalam pencapaian target anggaran sehingga dalam penyerapan anggaran dalam setiap program dan kegiatan yang tercantum pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat terealisasi semuanya dan memungkinkan untuk tahun selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas dari realisasi anggaran belanja.
2. Untuk tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja sudah dilaksanakan dengan baik, namun kedepannya untuk dapat dipertahankan tingkat efisiensinya sehingga mampu mencapai kriteria sangat efisien dengan memperhatikan penggunaan sumber daya (dana) dan berdasarkan prinsip efisiensi untuk menghindari pemborosan uang Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapelitbang. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon Periode Anggaran tahun 2015-2017*.
- Halim, A. dan Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- Manado, Berita., *Bapelitbang Tomohon Gelar Musrenbang RKPD tahun 2018*. <https://beritamanado.com/bapelitbang-tomohon-gelar-musrenbang-rkpd-tahun-2018/>. 12 Februari 2019.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta.
- Mahsun, M .2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Pangkey, I. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol 3, No 4. Hal. 33-43. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581/10168>. 12 Mei 2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Rampengan, M. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.16 No. 03 Tahun 2016. Hal. 616-623. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13530>. 21 Mei 2019.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang *Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan*.

Siregar, Baldric, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Trianto, A. 2016. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi Akuisisi*, Vol. 12, No 1. Hal. 65-77. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/92>. 20 Mei 2019.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

